

**EVALUASI PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME DAN PAJAK RESTORAN (STUDI KASUS PADA DINAS  
PENDAPATAN KOTA PALEMBANG)**



**Skripsi Oleh :**

**JOHANNES S SIPAYUNG  
01081003114  
Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**2013**

R 21164  
21628

S  
336.240 7  
Joh  
e  
C/1 - 131970  
2013



**EVALUASI PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME DAN PAJAK RESTORAN (STUDI KASUS PADA DINAS  
PENDAPATAN KOTA PALEMBANG)**



Skripsi Oleh :

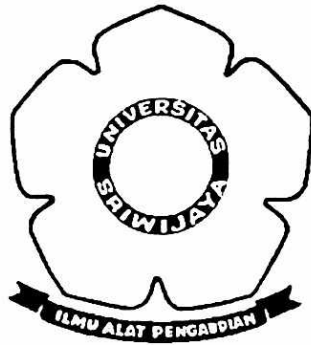
**JOHANNES S SIPAYUNG**  
**01081003114**  
**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**2013**

**EVALUASI PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME DAN PAJAK RESTORAN  
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN KOTA PALEMBANG)**



Skripsi Oleh:

**JOHANNES S SIPAYUNG**

**01081003114**

Jurusan Akuntansi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

2013

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**EVALUASI PROSEDUR PENETAPAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
DAN PAJAK RESTORAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN  
KOTA PALEMBANG)**

Disusun oleh :

Nama : Johannes S Sipayung  
NIM : 01081003114  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Telah di uji dalam ujian komprehensif pada tanggal 9 September 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, 9 September 2013

Ketua

Anggota

Anggota



Hj. Rochmawati Daud, SE, M.Si, Ak  
NIP. 196409031994032001



ARYANTO, SE, MTI, Ak  
NIP. 197408142001121003

H.Dewa Saputra, SE, MM, Ak  
NIP. 196312271992031004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Ahmad Subeki, SE, MM, Ak  
NIP. 196508161995121001

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**EVALUASI PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME DAN PAJAK RESTORAN**

**(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN KOTA PALEMBANG)**

Disusunoleh :


Nama : Johannes S Sipayung  
NIM : 01081003114  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
BidangKajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal Selasa, 20 Agustus 2013

Ketua :   
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si, Ak  
NIP 19640903 199403 2001

Tanggal Senin, 26 Agustus 2013

Anggota :   
Aryanto, SE, M.Ti, Ak  
NIP 19740814 200112 1003

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Johannes S Sipayung

NIM : 010810030114

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Pajak

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

**Evaluasi Prosedur Penetapan Pajak dan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan kota Palembang)**

Pembimbing:

Ketua : Hj. Rocmawati Daud, S.E., M.Si., Ak.

Anggota : Aryanto, S.E., M.Ti., Ak.

Tanggal Ujian :

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, September 2013

Johannes S Sipayung  
NIM 01081003114

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Johannes S Sipayung

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Januari 1990

Agama : Kristen Katolik

Alamat Rumah : Jl. Lintas Timur KM 35 Muhajirin

Alamat Email : johannessipayung@yahoo.co.id

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar : SD RK Cinta Rakyat II P.Siantar

SLTP : SMP RK Bintang Timur P. Siantar

SMU : SMA RK Budi Mulia P. Siantar

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Evaluasi Prosedur Penetapan Pajak dan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan kota Palembang)**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai penerapan penetapan pajak dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran pada kota Palembang. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang. Hasil penelitian membahas tentang peningkatan pajak reklame dan pajak restoran dari sisi pemungutan yang efektif dan efisien serta menyederhanakan sistem pemungutan pajak reklame dan restoran. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat umum dan akademisi terutama bagi Dispenda kota Palembang agar bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berguna di masa mendatang.

Penulis

Johannes Susanto Sipayung



## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Evaluasi Prosedur Penetapan Pajak dan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan kota Palembang)**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan sripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas perlindungan dan kasih-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, M.B.A selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. Taufik, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Hj. Rocmawati Daud, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing I dan bapak Aryanto, S.E., M.Ti., Ak.. selaku dosen pembimbing II yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Subeki, SE, M.M, Ak. selaku Ketua Jurusan dan bapak Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan.
6. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
7. Luk-luk fuada S.E. M.M, Ak telah bersedia membimbing akademik.
8. Seluruh dosen beserta staff dan karyawan yang ada di Fakultas Ekonomi.
9. Kepada Mama dan keluarga aku telah memberikan semangat dan petunjuk serta kesabaran dalam memberikan arahan yang benar.

10. Kepada my beibh Ocie makasih ya memberikan dukungan dan semangat serta dukungan moral dalam menyelesaikan skripsi
11. Semua teman- teman angkatan 2008 yang telah memberikan semangat dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Almamaterku Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, September 2013

Penulis

Johannes S Sipayung

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa

Nama : Johannes S Sipayung

NIM : 01081003114

Judul : Evaluasi Prosedur Penetapan dan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran( studi kasus pada Dinas Pendapatan kota Palembang)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tensesnya* dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 25 Juni 2013

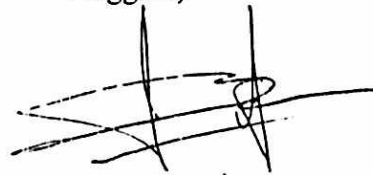
Pembimbing Skripsi

Ketua ,



Hj. Rochmawati Daud, S.L.,  
M.Si, Ak  
NIP 19640903 199403 2001

Anggota,



Aryanto, SE, M.Ti, Ak  
NIP 19740814 200112 100

## ABSTRAK

### EVALUASI PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK RESTORAN (STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN KOTA PALEMBANG)

Oleh:

Johannes S Sipayung

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.. Pertumbuhan restoran dan reklame kota Palembang meningkat setiap tahunnya, namun cenderung penerimaan pajak tersebut tidak meningkat. Sehingga perlu adanya evaluasi prosedur pemungutan pajak reklame dan pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penyajian data dalam bentuk deskriptif. Dimana analisis data dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemungutan pajak yang lama cenderung membuat wajib pajak yang dibinggungkan sistem pemungutan tersebut. Untuk itu Dinas Pendapatan kota Palembang harus memperbaiki sistem yang ada dengan cara: penyederhanaan sistem pemungutan pajak. Pembayaran pajak yang praktis dan cepat yakni melalui ATM dan juga melibatkan UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) dalam pemungutan pajak daerah.

**Kata kunci : *Penetapan, Pemungutan, Pajak Reklame, Pajak Restoran.***

**ABSTRACK**  
**EVALUATION PROCEDURES OF DETERMINATION AND COLLECTION**  
**ADVERTISEMENT AND RESTAURANT TAX**  
**(Case of Study: Dinas Pendapatan Kota Palembang)**

By  
Johannes S Sipayung

Tax is citizen contribution for the state treasury under the law which can be enforced without receiving direct retribution.. The growth of restaurant and advertisement in Palembang are increasing every year, but the tax revenue is not increase. So, it needs to make evaluation of advertisement tax collection procedure and restaurant tax to increase revenues advertisement tax and restaurant tax

The research is case of study, while the types of data are primary data and secondary data. The techniques of data collection used are library research and field research. Presentation of data is descriptive form, which data analysis is qualitative and quantitative analysis.

The result shows that the long process of tax collection tends to make taxpayer are confused by the collection system. So that, Department of Revenue Palembang has to repair the system by this way; simplification the tax collection system. The efficient tax payment by using ATM and involving UPTD (Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah) for the collection of tax region.

**Keyword:** Determination, collection, advertisement tax, restaurant tax.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
1.6 Objek Penelitian .....	9
1.7 Metode Penelitian.....	7

1.7.1 Desain Penelitian.....	10
1.7.3 Sumber Data dan teknik Pengumpulan Data.....	11
1.7.3.1 Sumber Data.....	11
1.7.3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Pajak Reklame dan Pajak Restoran .....	14
2.1.1 Pengertian Pajak Reklame .....	14
2.1.2 Pengertian Pajak Restoran .....	14
2.2 Subjek dan Objek Pajak Reklame dan Pajak Restoran .....	15
2.2.1 Subjek Pajak .....	15
2.2.1.1 Subjek Pajak Reklame .....	15
2.2.1.2 Subjek Pajak Restoran .....	15
2.2.2 Objek Pajak .....	15
2.2.2.1 Objek Pajak Reklame .....	16
2.2.2.2 Objek Pajak Restoran .....	17
2.3 Pengertian Pemungutan dan Penetapan Pajak Reklame dan Pajak Restoran .....	17
2.3.1 Pengertian Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran .....	17
2.3.2 Pengertian PenetapanPajak Reklame dan Pajak Restoran .....	19

2.3.2.1 Pengertian Penetapan Pajak Reklame .....	20
2.3.2.2 Pengertian Pnenetapan Pajak Restoran .....	23
<b>BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>24</b>
3.1 Gambaran Umum Instansi.....	24
3.1.1 Visi dan Misi.....	26
3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok Kerja .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
4.1 Evaluasi Penetapan Pajak Reklame dan Pajak Restoran	
Kota Palembang.....	78
4.1.1 Evaluasi Prosedur Penetapan Pajak Reklame .....	78
4.1.2 Evaluasi Prosedur Penetapan Pajak Restoran .....	83
4.2 Evaluasi Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran .....	86
4.2.1 Prosedur Pemungutan Pajak Relame dan Pajak Restoran	
Secara Umum .....	86
4.2.2 Angsuran dan Penundaan Prabayar.....	90
4.2.3 Penyetoran Pajak Reklame dan Pajak Restoran.....	93
4.2.4 Pembukuan dan Penetapan.....	96
4.2.5 Penagihan .....	98



<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran .....	107
Daftar Pustaka .....	108
Lampiran-lampiran .....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Tunggal Pajak Restoran.....	3
Tabel 1.2 Daftar Penerimaan Pajak Reklame.....	5
Tabel 2.1 Daftar Jenis Reklame, Nilai Jual, Lokasi Reklame, Tarif Pajak, Serta Lama Pemasangan .....	21
Tabel 2.2 Daftar Bobot Berdasarkan Lokasi, Luas Reklame, Sudut Pandang Dan Kelas Jalan.....	22
Tabel 2.3 Tempat Pemasangan Reklame di Kota Palembang.....	23
Tabel 4.1 Tempat Pemasangan Reklame Kota Palembang.....	80
Tabel 4.2 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pajak Reklame dan Pajak Restoran.....	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran .....	86
Gambar 4.2 Bagan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran yang Sederhana.....	88
Gambar 4.3 Bagan Prosedur Pelaksanaan Angsuran.....	90
Gambar 4.4 Bagan Prosedur Penundaan Pembayaran.....	92
Gambar 4.5 Alur Penyetoran yang Melibatkan Bank Sumsel.....	93
Gambar 4.6 Dispenda sebagai Tempat Pemungutan Pajak .....	94
Gambar 4.7 Bagan Prosedur Jika Terdapat Pajak Tambahan .....	97
Gambar 4.8 Bagan Prosedur Kelebihan Pembayaran Pajak.....	109
Gambar 4.1 Bagan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran .....	86



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum. Dengan adanya pajak tersebut dapat membantu pemerintah yang ada untuk melaksanakan pembangunan. Pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Selain untuk pembangunan, fungsi pajak adalah untuk membiayai pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan adanya pajak berarti membantu pemerintah dalam membiayai pengeluaran umum dapat berupa, belanja pegawai, belanja jasa, belanja barang, dan pembentuk dana cadangan tanpa timbal balik secara langsung.

Secara umum pajak menurut pemungutannya terdiri atas dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum. Dengan adanya pajak tersebut dapat membantu pemerintah yang ada untuk melaksanakan pembangunan. Pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Selain untuk pembangunan, fungsi pajak adalah untuk membiayai pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan adanya pajak berarti membantu pemerintah dalam membiayai pengeluaran umum dapat berupa, belanja pegawai, belanja jasa, belanja barang, dan pembentuk dana cadangan tanpa timbal balik secara langsung.

Secara umum pajak menurut pemungutannya terdiri atas dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dapat berupa, PPh, PPn, bea materai dan lain-lain. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa, pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, BPHTP, bea atas balik nama kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Pajak daerah dapat digunakan daerah untuk membiayai kegiatan daerahnya masing-masing. Dalam buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah (2009:4) kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari defenisi diatas pemerintah daerah wajib berkontribusi kepada daerahnya untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat dengan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Oleh karena itu setiap pemerintah daerah haruslah mengoptimalkan potensi pajak yang ada didaerahnya untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan daerahnya itu sendiri. Potensi pajak daerah itu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh hasil maksimal demi tercapainya kemakmuran rakyat di daerahnya itu sendiri.

Di kota-kota besar di Indonesia potensi pajak daerah sangatlah bermanfaat untuk kepentingan daerahnya sendiri. Sepertinya halnya Palembang sebagai kota Metropolitan memiliki potensi-potensi pajak daerah yang sangat mendukung untuk pembiayaan daerahnya, seperti: spanduk, baliho, iklan televisi (tv) berjalan bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar *Laser Compact Disk* (LCD)

raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron, hotel, pemanfaatan air bawah tanah, restoran mulai dari restoran kecil sampai restoran kelas atas dan lain-lain. Banyaknya potensi-potensi pajak daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kota Palembang. Maka pajak reklame dan pajak restoran merupakan pajak yang bisa dikelola dengan maksimal oleh pemerintahan kota Palembang. Karena menyumbang kontribusi besar bagi pemerintah kota Palembang mengingat bahwa kota Palembang sebagai daerah pemasaran yang optimal dan cocok untuk daerah untuk kegiatan berbisnis dan berdagang.

Menurut Siahaan dan Sofyan (2005), pemasukan dari pajak reklame didapat dari nilai sewa reklame yang dipasang dengan tarif sewa reklame berdasarkan dari lokasi pemasangan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan jenis ukuran reklame. Sedangkan pajak restoran, pajak ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan restoran termasuk rumah makan, *cafe*, bar dan sejenisnya, tidak termasuk usaha boga dan catering. karena itu pemerintah kota Palembang harus berhati hati dalam menentukan kajian penetapan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan besarnya pajak, apabila terjadi kekeliruan maka akan mengurangi penerimaan pendapatan bagi pemerintah kota Palembang.

Secara umum sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku di Indonesia dan dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah: *Official Assesment dan Self Assesment*. Di dalam *official Assesment*, wewenang pemungutan pajak ada pada aparat pajak (*fiscus*). Dalam sistem ini para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan *fiscus* mengenai utang pajaknya.

Sedangkan di dalam *Self Assesment system*, wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan kota Palembang.

Dengan adanya pajak reklame dan pajak restoran, terdapat celah atau kelemahan pada sisi penetapan besarnya pajak restoran dapat berupa, kesalahan dalam menentukan besarnya pajak yang disebabkan ketidakpahaman petugas. Dapat berupa penetapan untuk pajak restoran atau rumah makan kecil dimana petugas menetapkan sampel rata-rata dalam menentukan besarnya pajak restoran hal ini merupakan kerugian bagi pemerintah kota Palembang. Karena akan sulit menentukan besarnya pajak restoran yang benar terjadi. Selain itu terdapat juga kelemahan pajak restoran dalam pengelolaan di lapangan, maupun mekanismenya dapat berupa;

**Tabel 1.1**  
Daftar Tunggakan Pajak Restoran

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan Pajak
2009	169	Rp 363.294.948,00
2010	160	Rp 411.373.750,00
2011	191	Rp 423.615.200,00
2012	314	Rp 627.657.968,00
Jumlah Tunggakan Pajak	834	Rp 1.825.941.866,00

Sumber: Data Dinas Pendapatan kota Palembang 2013

Dari data diatas jelas tunggakan pajak restoran sampai tahun 2013 sangatlah tinggi yaitu mencapai Rp 1.825.941.866,00. Besarnya tunggakan ini sangatlah besar untuk itu perlu ada. Untuk itu perlu adanya prosedur yang harus diterapkan untuk menagih tunggakan pajak restoran yang besar ini.



**Tabel 1.2**  
Daftar Penerimaan Pajak Reklame.

Tahun	Target	Realisasi
2009	Rp 4.750.000.000,00	Rp. 4.138.404.435,00
2010	Rp. 5.250.000.000,00	Rp. 4.225.282.834,00
2011	Rp 6.500.000.000,00	Rp.4.603.540.213,00
2012	Rp.5.121.951.765,00	Rp.7. 937. 771.136,00

Sumber: Data Dinas Pendapatan kota Palembang 2013

Dari diatas 2011 merupakan target yang paling tinggi yakni Rp.6.500.000.000,00 namun target realisasi pajak untuk tahun 2011 rendah yakni Rp.4.603.540.213,00 yaitu 70,82% hal ini disebabkan ada beberapa penetapan pajak reklame yang keliru, ada beberapa tempat tidak lagi diperbolehkan pemasangan reklame. Hal ini penyebab terjadinya kekeliruan mekanisme dalam prosedur penetapan dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran serta pengelolaan dilapangan. Untuk itu perlu adanya **Evaluasi Prosedur Penetapan dan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran. (Studi Kasus: Dinas Pendapatan kota Palembang).**

## 1.2. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan kota Palembang dan keterbatasan waktu yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini, penulis membatasi kegiatan serta ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penetapan dan pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Palembang

2. Bagaimana prosedur penetapan dan pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Palembang

3. Bagaimana prosedur penetapan dan pemungutan yang baik untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran di kota Palembang.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penetapan dan pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan kota Palembang.
2. Untuk mengetahui prosedur penetapan dan pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan kota Palembang.
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan dan pemungutan yang baik untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak restoran di kota Palembang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat riil bagi pihak pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi akademis**

Dengan adanya penulisan ini dapat memberikan tambahan terhadap ilmu yang terkait seperti perpajakan Indonesia, akuntansi sector public, dan metodologi penelitian khususnya yang berhubungan dengan evaluasi

prosedur penetapan dan pemungguta pajak reklame dan restoran di Dinas Pendapatan Kota Palembang.

2. Bagi penulis.

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memahami prosedur penetapan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah kota Palembang.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pajak Reklame dan Pajak Restoran, Sistem Pemungutan dan Penetapan Pajak, Akuntansi Sektor Publik dan Metodologi.

4. Bagi perusahaan (Dispenda)

Sebagai pertimbangan bagi Pemerintah kota Palembang khususnya Dinas Pendapatan kota Palembang mengenai penetapan dan pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Palembang.

**1.5. Sistematika Penulisan.**

**BAB I PENDAHULUAN.**

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sistematika Penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI.**

Berisikan landasan teori yang berkaitan dengan Penetapan dan Pemungutan pajak reklame dan pajak restoran kota Palembang, gambaran umum instansi sebagai objek penelitian

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisikan mengenai lokasi Penelitian, populasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Berisikan mengenai, gambaran umum instansi, visi dan misi instansi, sistem dan prosedur penetapan dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di kota Palembang, ketentuan penetapan perundangundangan tentang pajak reklame dan restoran kota Palembang dan pelaksanaannya, sistem pengawasan pajak reklame dan pajak restoran, dan kendala-kendala pemungutan pemungutan pajak reklame dan restoran dan upaya peningkatan mekanisme pemungutan pajak reklame dan pajak restoran.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil penelitian, saran yang memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu sendiri

baik secara praktis, teoritis dan metodologis, serta keterbatasan penelitian.

### **1.6. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah evaluasi penetapan dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan kota Palembang. Menurut Sugiyono (2006:13), objek penelitian adalah sarana ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal. Dari pengertian diatas objek penelitian suatu hal yang secara ilmiah untuk mendapatkan sesuatu berdasarkan objektif, *valid*, dan *reliable*. berdasarkan pengertian diatas objek penelitian ini adalah pajak reklame dan pajak restoran.

### **1.7. Metode Penelitian.**

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:4) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Menurut penulis cara ilmiah disini berarti kegiatan penelitian ini di dasarkan pada ciri ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.

Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah yang bersifat logis.

Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam dalam penyusunan penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi saat penelitian ini berlangsung. menurut Moh. Nazir (2003:4) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan peneliti ini menggambarkan dan menganalisis secara jelas penetapan dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan kota Palembang. Metode ini merupakan suatu penulisan yang menggambarkan secara jelas keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian ini berlangsung.

#### **1.7.1. Desain Penelitian.**

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan perencanaan penelitian agar penelitian yang di lakukan dapat berjalan dengan baik, sistematis serta efektif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:10), Desain Penelitian adalah prosedur-prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan, pengumpulan, dan analisis data secara keseluruhan. berdasarkan pengertian diatas, desain penelitian proses yang dilaksanakan penulis dalam melaksanakan penelitian, mulai tahap perencanaan sampai tahap penelitian dilaksanakan dengan cara memilih, mengumpulkan, dan menganalisis data secara keseluruhan.

### **1.7.2. Operasionalisasi Variabel.**

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu: evaluasi penetapan dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan kota Palembang.

### **1.7.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.**

Sumber data dan teknik pengumpulan data yang diambil penulis adalah sebagai berikut:

#### **1.7.3.1 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan data mentah atau belum diolah sama sekali dapat berupa prosedur-prosedur dalam penetapan dan pemungutan pajak reklame dan restoran, sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah atau disajikan dalam bentuk yang lain dapat berupa: kajian penelitian terdahulu, teknis dalam melakukan penetapan dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di kota Palembang.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. berdasarkan penjelasan diatas maka data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data langsung dan data tidak langsung,

data langsung merupakan data primer, sedangkan data tidak langsung merupakan data primer yang telah diolah sebelumnya oleh pihak lain.

### 1.7.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mempermudah dalam memperoleh data yang sangat penting dalam penulisan ini diantaranya:

#### 1. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi :

##### a. Metode Observasi (pengamatan)

Tinjauan atas pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah yang telah ada dari segi observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan kota Palembang di bagian penetapan dan penagihan

##### b. Metode *Interview*

*Interview* dilakukan dengan pegawai/staf bagian pendapatan yang berwenang di Dinas Pendapatan kota Palembang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan judul Penelitian yang sedang disusun penulis.

##### c. Dokumentasi



Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data tentang prosedur penetapan dan pemungutan pajak reklame dan restoran yang diperoleh di Dinas Pendapatan kota Palembang.

## 2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan yaitu Metodologi Penelitian, Perpajakan, Peraturan Undang-undang Pemerintah Daerah, dan Akuntansi Sektor Publik guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada instansi yang bersangkutan. Dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai penetapan dan pemungutan pajak reklame dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## Daftar Pustaka

- Indiantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE\_ Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Rahayu, S., & Suhayati, E. (2009). *Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahhaan, M. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabetis.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1999 Tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Daerah
- Waluyo. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.